

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Teori keagenan menjelaskan suatu hubungan kontraktual antara *principal* (pemegang saham) dan *agent* (manajemen), yang terjadi akibat pengambilan keputusan ekonomi. Menurut Jensen & Meckling (1976) sering terjadi konflik kepentingan akibat perbedaan tujuan dan asimetri informasi antara kedua belah pihak. Manajemen sebagai pengelola perusahaan memiliki akses informasi yang lebih luas dibandingkan pemegang saham. Sehingga manajemen dapat memunculkan potensi manipulatif dalam menyusun laporan keuangan untuk kepentingan pribadi mereka, Jensen & Meckling (1976).

Dalam konteks ini, peran dari audit eksternal independen berfungsi sebagai mekanisme pengawasan (*monitoring mechanism*) untuk memperkecil dari yang timbul dalam hubungan keagenan. Auditor bertanggung jawab untuk memberikan opini yang objektif agar memperkecil perilaku penyimpangan dan membatasi potensi tindakan yang tidak etis atau manipulatif dari pihak manajemen. Menurut teori keagenan, semakin besar potensi konflik atau risiko moral *hazard*, maka semakin tinggi kebutuhan akan auditor yang independen dan kredibel Fauziyah et al (2019).

Kaitan teori keagenan dengan *auditor switching* muncul jika hubungan antara manajemen dan auditor sedang terjadi hilang kepercayaan. Apabila auditor dianggap terlalu ketat, memberikan opini modifikasi, dan tidak sejalan dengan kepentingan manajemen maka perusahaan dapat memutuskan untuk mengganti auditor. Sebaliknya jika pemegang saham menemukan bahwa auditor terlalu lunak mereka juga dapat menuntut untuk memperbaiki kredibilitas laporan keuangan dan melakukan pergantian auditor. Dengan demikian pergantian auditor (*auditor switching*) bukan sekedar formalitas, melainkan strategi untuk menjaga kredibilitas laporan keuangan.

Oleh karena itu, banyak perusahaan memilih auditor dengan reputasi tinggi seperti (*KAP Big Four*) untuk mengurangi biaya agensi dan memperkuat keandalan laporan keuangan. Sebaliknya, perusahaan kecil dengan keuangan *financial distress* lebih memilih untuk memilih auditor yang lebih murah untuk menekan biaya audit, walaupun dengan resiko kredibilitas auditor yang kurang baik.

2.1.2 Teori Sinyal (*Signaling Theory*)

Teori sinyal (*signaling theory*) pertama kali dikembangkan oleh Spence (1973) yang menjelaskan bahwa pihak manajemen memiliki informasi internal perusahaan yang lebih banyak dan lebih cepat dibandingkan pihak eksternal (investor). Kondisi ini menciptakan asimetri informasi. Untuk mengurangi asimetri tersebut, perusahaan memberikan "sinyal" berupa informasi atau tindakan strategis yang dapat ditangkap oleh pasar sebagai kabar baik (*good news*) atau kabar buruk (*bad news*). Informasi sinyal ini dapat mencakup laporan keuangan, keputusan manajemen, atau tindakan korporasi yang dapat diinterpretasikan oleh pasar sebagai indikator kondisi saat ini atau prospek masa depan perusahaan.

Pada konteks penggantian auditor, teori sinyal menyarankan bahwa manajemen dapat menggunakan perubahan auditor untuk menyampaikan pesan tertentu kepada pasar. Misalnya, jika sebuah perusahaan beralih dari firma akuntansi publik non-*Big Four* ke firma akuntansi publik *Big Four*, langkah ini mungkin diinterpretasikan sebagai sinyal positif yang mencerminkan komitmen perusahaan untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan transparansi laporan keuangannya. Di sisi lain, jika perusahaan beralih ke firma akuntansi publik yang lebih kecil, pasar mungkin menginterpretasikan hal ini sebagai sinyal negatif, yang menunjukkan upaya perusahaan untuk mengurangi biaya atau menghindari audit yang lebih mendalam.

Selain itu, perusahaan yang mengalami tekanan *financial distress* atau tekanan dari eksteran, lebih memilih untuk mengganti auditor (*auditor switching*) dengan tujuan untuk menenangkan hati dari investor. Perusahaan lebih memilih auditor yang sudah memiliki nama atau menunjukkan perubahan yang sangat signifikan dalam sistem audit, agar dapat mengembalikan kepercayaan dari pihak

eksternal. dengan demikian, *auditor switching* dapat dianggap sebagai alat komunikasi strategis untuk membangun persepsi positif terhadap perusahaan di mata publik dan investor.

2.2 Auditor Switching

Menurut Sumarwoto (2006) dalam Istri et al (2016), *auditor switching* adalah rotasi pergantian KAP atau auditor. Rotasi audit dibagi menjadi dua sifat yaitu wajib (*mandatory*) dan sukarela (*voluntary*). Pergantian wajib atau *mandatory* merupakan pergantian yang dibatasi oleh waktu kurun tertentu yang sudah ditetapkan dalam peraturan pemerintah, sedangkan pergantian sukarela atau *voluntary* dilakukan karena keinginan klien dan atau auditor itu sendiri karena adanya beberapa faktor. Lama hubungan klien dan auditor menyebabkan terganggunya independensi dan keakuratan auditor saat melaksanakan tugasnya (Nugrahanti, 2014).

Auditor switching diatur dalam PP Nomor 20 tahun 2015 yang dijelaskan pada Pasal 11 ayat 1a untuk auditor dapat memberikan jasa audit kepada entitas sehubungan dengan informasi riwayat keuangan maksimal lima periode akuntansi 15 berturut-turut. Pemerintah juga mengawasi akuntan publik dalam mengaudit dengan menetapkan peraturan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK mengeluarkan peraturan dalam POJK No. 13 Tahun 2017 yang berisikan tentang pembatasan penggunaan jasa akuntan publik oleh penyedia jasa keuangan. Dalam peraturan tersebut diatur bahwa jasa akuntan publik dibatasi paling lama 3 tahun berturut-turut untuk institusi keuangan sedangkan untuk penggunaan jasa KAP tergantung menurut dari hasil evaluasi komite audit. Dengan diberlakukannya peraturan-peraturan tersebut dapat mencegah terjadinya hubungan spesial antara auditor dengan klien sehingga kualitas audit tetap baik dan terjaga dengan mengganti auditor.

Dalam penelitian ini *Auditor switching* diukur dengan variabel *dummy* dengan melihat pergantian dari KAP yaitu diberikan nilai 1 jika terjadi *auditor switching*, dan nilai 0 diberikan ketika tidak terjadi *uditor switching*.

2.3 Ukuran Perusahaan (*Firm size*)

Menurut Azizah (2019) ukuran perusahaan adalah skala besar kecilnya perusahaan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai cara antara lain dengan ukuran pendapatan, total aset dan total ekuitas. Ukuran perusahaan adalah skala ukuran yang dilihat dari total aset suatu perusahaan atau organisasi yang menggabungkan dan mengorganisasikan berbagai sumber daya dengan tujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk dijual.

Pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan didukung oleh *signaling theory*. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Ross pada tahun 1977. Menurut Brigham & Houston (2011), Teori *Signaling* adalah “tindakan perusahaan dalam memberi sinyal kepada investor bagaimana manajemen memandang perusahaan”.

Ukuran perusahaan yang didasarkan pada total aset pada umumnya disebabkan karena anggapan manager bahwa perusahaan yang dimiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut relatif stabil dan mampu menghasilkan laba yang besar. Perusahaan yang berukuran besar memiliki basis pemegang kepentingan yang lebih luas, sehingga kebijakan-kebijakan perusahaan akan berdampak lebih besar terhadap kepentingan publik dibandingkan dengan perusahaan kecil. Bagi investor, kebijakan perusahaan akan berimplikasi terhadap prospek *cashflow* dimasa yang akan datang. Sedangkan bagi regulator, akan berdampak terhadap besarnya pajak yang diterima dan efektifitas peran pemberian perlindungan terhadap masyarakat secara umum. Menurut Hartono (2012) “Ukuran Perusahaan (*firm size*) adalah besar kecilnya perusahaan dapat diukur dengan total aset atau besar harta perusahaan dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma total aset”. Adapun, Kurniasih (2012) dalam penelitian Manto & Lesmana (2018) menyatakan ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan.

Ketiga definisi di atas menunjukkan bahwa ukuran perusahaan merupakan nilai besar kecilnya perusahaan yang dilihat dari besarnya *equity*, nilai penjualan, dan aset yang berperan sebagai variabel konteks yang mengatur tuntutan pelayanan atau produk yang dihasilkan oleh organisasi. Ukuran perusahaan terbagi menjadi

tiga jenis antara lain sebagai berikut sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2008 (Republik Indonesia, 2008)

1. Perusahaan besar

Perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih sebesar lebih dari Rp 10 miliar termasuk tanah dan bangunan. Memiliki penjualan bersih lebih dari Rp 50 Miliar/tahun.

2. Perusahaan menengah

Perusahaan menengah adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih Rp 1-10 Miliar dan kurang dari Rp 50 miliar.

3. Perusahaan kecil

Perusahaan kecil adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan serta memiliki hasil penjualan minimal Rp 1 Miliar/tahun

Perusahaan dengan total aset yang besar cenderung lebih cepat dalam menyampaikan laporan audit mereka kepada publik dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki total aset yang lebih kecil. Berdasarkan penjelasan Ahmad dan Kamarudi (2003) dalam penelitian Rustiana,(2007). Alasan mengapa perusahaan besar yang terdaftar di bursa efek dapat segera mengumumkan hasil yang kuat, yang membantu mengurangi tingkat kesalahan dalam penyusunan dokumen keuangan perusahaan, sehingga memudahkan tugas auditor dalam memeriksa laporan-laporan tersebut. Selain itu, perusahaan besar memiliki kemampuan finansial untuk membayar biaya audit yang lebih tinggi guna memperoleh layanan audit yang lebih efisien dan cepat. Akhirnya, perusahaan besar sering menghadapi tekanan yang intens dari pihak eksternal terkait kinerja keuangan mereka, sehingga manajer akan berusaha untuk menerbitkan laporan audit yang terverifikasi dan dokumen keuangan tepat waktu.

2.4 Financial distress

Financial distress menurut Curry dan Banjarnaror (2018), adalah dimana kondisi keuangan sedang mengalami keadaan yang tidak sehat dan mengalami penurunan sebelum terjadinya kebangkrutan.

Menurut Fachrudin 2008 dalam Fatmawati & Amelia,(2017), keuangan yang mengalami kesulitan ditandai ketika perusahaan memenuhi jadwal pembayaran atau ketika proyeksi arus kas mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut akan segera tidak dapat memenuhi kewajibannya. Hal ini biasa disebabkan oleh biaya yang tinggi, tingkat aset yang tidak *liquid* yang besar, atau pendapatan yang telah menurun sehingga munculnya daanya penurunan ekonomi.

Financial distress cycle yang terjadi dalam perusahaan mencakup periode awal penurunan kinerja hingga ke titik terendah hingga tahap pemulihan, apabila perusahaan bisa memperbaiki kinerjanya. Ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan, maka khususnya perusahaan tidak berada pada posisi yang sama, melainkan akan terus bertransisi ke tahapan selanjutnya.

Financial distress dapat terjadi diawali saat perusahaan tidak dapat memenuhi seluruh kewajiban sehingga membuat menurunnya kondisi keuangan perusahaan Rahayu & Sopian (2015). *Failure* merupakan kegagalan ekonomi yang terjadi ketika perusahaan kehilangan pendapatan dan tidak dapat menutup total biaya operasinya Helena & Saifi (2019). Kebangkrutan adalah keadaan terburuk suatu perusahaan yang tengah berada dalam kondisi *financial distress* dimana perusahaan berada di titik terendah dari kondisi perusahaan yang tidak mampu memenuhi hutang atau kewajibannya. (Wardani, 2022).

Financial distress dapat *diintrepretasikan* dimana keadaan perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang ditandai dengan arus kas yang dihasilkan perusahaan tidak cukup untuk memenuhi kewajiban jangka panjang maupun jangka pendek serta perusahaan juga diharuskan melakukan koreksi terhadap aktivitas perusahaan. Jika perusahaan tersebut mengalami *financial distress* dan tidak ada tindakan lanjut untuk perbaikan, maka perusahaan dapat mengalami kebangkrutan atau bisa jadi dapat dilikuidasi. Namun, jika kinerja perusahaan membaik maka perusahaan juga memiliki kesempatan untuk mengatasi kesulitan keuangan.

1) Indikator *Financial Distress*

Tanda-tanda kesulitan keuangan dalam suatu perusahaan dapat dengan cepat terdeteksi melalui kinerjanya. Kinerja ini terlihat jelas dalam laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan. Kriteria untuk mengidentifikasi kesulitan keuangan suatu perusahaan, seperti yang disebutkan oleh Teng (2002) dalam Syaifudin, 2012, meliputi:

- a. Profitabilitas negatif
- b. Merosotnya nilai pasar
- c. Posisi kas yang buruk (Negatif) ketidakmampuan untuk melunasi kewajiban kas
- d. Penurunan volume pasar
- e. Tingginya perputaran karyawan dan rendahnya moral.
- f. *Financial distress* juga menimbulkan dampak seperti penilaian yang buruk terhadap kinerja manajemen perusahaan, penting banyaknya karyawan yang keluar karena akan terjadi kemungkinan penurunan upah (gaji).

Indikator yang mendakan untuk mengetahui ada adanya kesulitan keuangan yang dilihat dari pihak internal perusahaan Ratna & Marwati (2018),S yaitu:

- Turunnya volume penjualan karena ketidakmampuan manajemen dalam menerapkan kebijakan dan strategi
- Turunnya kemampuan perusahaan dalam mencetak keuntungan.
- Ketergantungan terhadap utang sangat besar.

Jika dilihat dari Eksternal:

- Penurunan jumlah dividen yang dibagikan kepada pemegang saham selama beberapa periode berturut-turut.
- Penurunan laba secara terus-menerus dan perusahaan mengalami kerugian.
- Ditutup atau dijualnya satu atau lebih unit usaha.

- Pemecatan pegawai secara besar-besaran.
- Harga dipasar mulai menurun terus menerus.

2) Jenis Jenis *Financial distress*

1) *Economic failure*

Ini adalah kondisi di mana pendapatan perusahaan tidak mampu menutupi seluruh total beban biaya perusahaan, termasuk beban biaya modal. Kegagalan jenis ini bisa disebabkan oleh fluktuasi ekonomi yang signifikan atau resesi.

2) *Business failure*

Kegagalan bisnis dapat diartikan bahwa operasi bisnis dihentikan dengan alasan mengalami kerugian dan tidak melanjutkan aktivitas bisnisnya.

3) *Technical insolvency*

Dimana kondisi perusahaan tidak bisa memenuhi kewajiban lancarnya atau secara teknis perusahaan tidak mampu dalam membayar hutketidakmampuan perusahaan dalam membayar hutang dengan menunjukkan dimana kondisi perusahaan mengalami kekurangan likuiditas yang sifatnya sementara bisa membayar hutangnya dan juga *survive* bila diberi waktu.

4) *Insolvency in bankruptcy*

Perusahaan memiliki nilai buku hutang yang melebihi nilai pasar aset dan lebih serius dari *technical insolvency* yang umumnya merupakan tanda *economic failure*. Selain itu, perusahaan dalam kondisi ini juga tidak perlu berurusan dengan tuntutan secara hukum.

5) *Legal bankruptcy*

Bila perusahaan dianggap mengalami kebangkrutan secara hukum jika perusahaan melaporkan tuntutan secara resmi sesuai undang-undang.

2.4.1 Penyebab *Financial Distress*

Menurut Diwanti dan Purwanto (2020) dalam penelitian Imran & Irnaini, (2023) , terdapat tiga penyebab utama yang mendorong suatu perusahaan ke dalam kesulitan keuangan dan pada akhirnya menyebabkan kebangkrutan:

- a. *Neoclassical model*, *financial distress* dan kebangkrutan terjadi apabila distribusi sumber daya tidak dilakukan secara optimal, manajemen perusahaan seriangkali gagal mengelola sumber daya atau aset yang tersedia untuk mendukung operasional sehari-hari.
- b. *Financial model*, pencampuran aset benar namun struktur keuangan salah dengan kendala likuiditas. Artinya, meskipun perusahaan dapat bertahan dalam jangka panjang, namun harus bangkrut juga dalam jangka pendek.
- c. *Corporate governance model*, kondisi kebangkrutan dapat terjadi bahkan ketika perusahaan memiliki aset dan kerangka kerja keuangan yang memadai, namun dikelola secara tidak efisien. Akibatnya, organisasi-organisasi ini mungkin terpaksa keluar dari arena bisnis akibat masalah tata kelola korporasi yang tidak terselesaikan.

2.4.2 Prediksi *Financial Distress*

Ketika suatu perusahaan sedang mengalami *financial distress*, maka perusahaan harus memahami bahwa keadaan tersebut merupakan salah satu sinyal bahwa perusahaan akan mengalami kebangkrutan. Salah satu tindakan yang dapat diambil oleh perusahaan adalah dengan melakukan prediksi *financial distress*.

Ada berbagai metode yang dikembangkan untuk memprediksi *financial distress*. Salah satu metode tersebut adalah dengan menganalisis rasio keuangan yang telah tercantum dalam laporan keuangan. Analisis rasio keuangan adalah teknik yang paling umum untuk memprediksi *financial distress*. Selain itu, kesulitan keuangan juga dapat diprediksi melalui evaluasi arus kas. Selain dua metode tersebut, sejumlah model telah dirancang untuk memprediksi kesulitan keuangan. Model-model ini merupakan pendekatan multivariat yang

dikembangkan oleh para ahli, yang memanfaatkan dua atau lebih rasio secara bersamaan dalam satu rumus, dan telah terbukti efektif dalam memprediksi kesulitan keuangan.

2.5 *Audit report lag*

Berdasarkan penjelasan Widajantie dan Dewi (2020) dalam penelitian Wardani (2022), keterlambatan laporan audit merujuk pada waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses audit, yang diukur dari akhir periode akuntansi perusahaan hingga saat laporan keuangan yang diaudit diterbitkan dan ditandatangani. Di sisi lain, Cut dan Mardania (2021) mendefinisikan *audit report lag* sebagai durasi yang diperlukan untuk menyelesaikan audit laporan keuangan tahunan, yang dinilai dengan menghitung jumlah hari yang dibutuhkan untuk memperoleh dokumen keuangan yang telah diverifikasi secara independen. Mengacu pada penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa *audit report lag* adalah rentang waktu yang diperlukan untuk memperoleh laporan keuangan yang telah diaudit secara independen, mulai dari akhir buku perusahaan hingga laporan tersebut ditandatangani.

Dyer dan Mchugh dalam Widhiasari dan Ketut, (2016) mengungkapkan tiga kriteria atau jenis keterlambatan pelaporan laporan keuangan, yaitu :

1. *Audit report lag* merupakan interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal laporan auditor ditandatangani.
2. *Preliminary lag* merupakan interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai penerimaan laporan akhir *preliminary* oleh BEI.
3. *Total lag* merupakan interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal penerimaan laporan dipublikasikan di BEI.

Rumus pengurannya sebagai berikut:

$$ARL = \text{Tanggal opini audit} - \text{Tanggal akhir Tahun fiskal}$$

2.6 Audit Fee

Audit fee merupakan imbalan jasa profesional yang diterima oleh auditor eksternal atas pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan suatu entitas. *Audit fee* mencerminkan kompensasi atas waktu, keahlian, tingkat kompleksitas pekerjaan audit, serta risiko audit yang dihadapi auditor dalam memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan klien. Menurut Arens, Elder, dan Beasley (2020), *Audit fee* ditentukan berdasarkan tingkat usaha audit (*audit effort*) yang diperlukan, yang dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, kompleksitas operasi, sistem pengendalian internal, serta risiko salah saji material. Dalam konteks perusahaan publik, *audit fee* juga mencerminkan karakteristik hubungan antara auditor dan klien. Perusahaan dengan ukuran besar dan struktur operasi yang kompleks cenderung membayar *audit fee* yang lebih tinggi karena membutuhkan prosedur audit yang lebih luas dan mendalam. Sebaliknya, perusahaan dengan ukuran relatif kecil dan aktivitas operasional yang sederhana umumnya dikenakan *audit fee* yang lebih rendah. Oleh karena itu, *audit fee* sering digunakan sebagai indikator tidak langsung dari kualitas audit dan tingkat risiko audit Hay, Knechel, & Willekens, (2021). Di Indonesia, informasi mengenai *audit fee* umumnya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan atau laporan tahunan perusahaan. Pengungkapan *Audit fee* menjadi penting karena memberikan transparansi mengenai hubungan ekonomi antara auditor dan klien, sekaligus menjadi dasar bagi pemangku kepentingan dalam menilai independensi auditor.

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

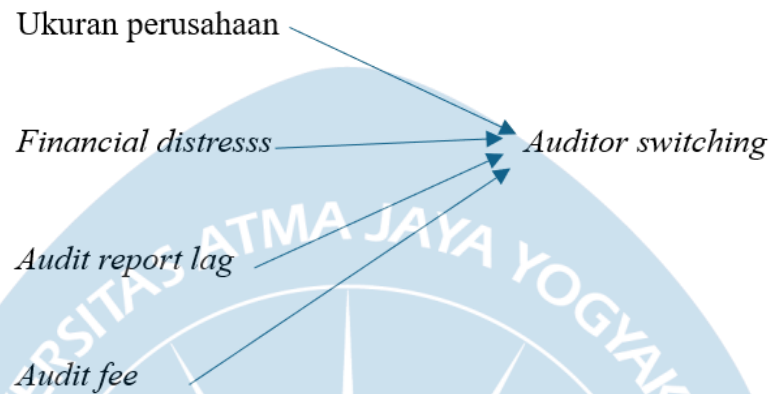
No	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian	Gap Penelitian
1	<i>Pengaruh Ukuran Perusahaan, Fee Audit dan Audit Tenure Terhadap Pemilihan Tipe KAP Pada Perusahaan Sektor Keuangan BEI 2021–2023</i> (Sapitri et al., 2025)	Kuantitatif, regresi	Ukuran perusahaan, <i>Audit fee</i> , dan audit tenure berpengaruh terhadap pemilihan tipe KAP, bukan <i>Auditor switching</i> .	Tidak meneliti <i>Financial distresss</i> , <i>audit report lag</i> , ataupun <i>Auditor switching</i> pada periode 2020–2024.
2	<i>Pengaruh Audit Tenure, Auditor switching, Audit fee dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kualitas Audit</i> (Guska & Yanti, 2025)	Kuantitatif	Audit tenure dan <i>Auditor switching</i> berpengaruh terhadap kualitas audit; ukuran perusahaan & <i>Audit fee</i> tidak.	Tidak menguji <i>Financial distresss</i> atau <i>audit report lag</i> terhadap <i>Auditor switching</i> . Fokus pada kualitas audit, bukan <i>switching</i> .
3	<i>The Influence of Audit Delay, Size of Public Accounting Firm, Audit Opinion, and Management Change on Auditor</i>	Kuantitatif	<i>Auditor switching</i> dipengaruhi audit delay, ukuran KAP, opini audit, perubahan manajemen.	Variabel ukuran perusahaan, <i>Financial distresss</i> , <i>audit report lag</i> , dan <i>Audit fee</i> tidak diteliti.

	<i>switching</i> (Wahyuni et al., 2024)			
4	<i>Pengaruh Fee Audit, Ukuran KAP, Ukuran Perusahaan, Audit report lag Terhadap Kualitas Audit</i> (Falisah et al., 2025)	Kuantitatif	Ukuran perusahaan, <i>Audit fee</i> , & <i>audit report lag</i> berpengaruh terhadap kualitas audit.	Tidak meneliti <i>Financial distresss</i> atau <i>Auditor switching</i> . Periode berbeda.
5	<i>Pengaruh Opini Audit dan Audit report lag Terhadap Voluntary Auditor switching dengan Financial distresss sebagai Pemoderasi</i> (Mahariyani et al., 2022)	Kuantitatif	Audit opinion & <i>audit report lag</i> berpengaruh terhadap <i>voluntary switching</i> ; <i>Financial distresss</i> memoderasi.	Tidak menguji pengaruh ukuran perusahaan & <i>Audit fee</i> . Periode tidak sesuai 2020–2024.
6	<i>Pengaruh Financial distresss, Audit Tenure, Opini Audit, dan Audit Delay terhadap Auditor switching</i> (Guti et al., 2025)	Kuantitatif	<i>Auditor switching</i> dipengaruhi audit delay, <i>Financial distresss</i> , audit tenure, opini audit.	Tidak meneliti ukuran perusahaan maupun <i>Audit fee</i> . Periode 2020–2023 sektor energi saja.

7	<i>Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Pergantian Auditor Terhadap Audit Delay</i> (Chonjue & Yanto, 2024)	Kuantitatif	<i>Auditor switching</i> dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit delay.	Tidak membahas <i>Audit fee</i> , <i>audit report lag</i> , atau <i>Financial distresss</i> terhadap <i>Auditor switching</i> .
8	<i>Pengaruh Ukuran KAP, Fee Audit, dan Financial distresss Terhadap Audit Delay</i> (Rahayu & Sulindawati, 2024)	Kuantitatif	Audit delay dipengaruhi fee audit & <i>Financial distresss</i> .	Tidak membahas <i>Auditor switching</i> & <i>audit report lag</i> dalam konteks switching.
9	<i>Pengaruh Audit fee, Audit Tenure dan Financial distresss Terhadap Auditor switching</i> (Syahbani & Anisa, 2023)	Kuantitatif	Audit tenure berpengaruh pada switching; <i>Audit fee</i> & <i>Financial distresss</i> tidak berpengaruh.	Tidak menguji ukuran perusahaan atau <i>audit report lag</i> . Periode sebelum 2024.
10	<i>Pengaruh Firm size dan Opini Audit terhadap Audit Delay</i> (Deianira, 2025)	Kuantitatif	Ukuran perusahaan dan opini audit mempengaruhi audit delay.	Tidak meneliti <i>Audit fee</i> , <i>audit report lag</i> , atau <i>Financial distresss</i> terhadap <i>Auditor switching</i> .

2.8 Kerangka Berpikir

Keterkaitan konseptual antar variabel



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

2.9 Hipotesis Penelitian

2.9.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Auditor Switching* (H1)

Menurut Buchari dan Marita (2014) dalam Denindya Jurel Aricksa (2020), ukuran perusahaan merupakan skala yang menentukan besar atau kecilnya sebuah perusahaan yang dapat dilihat dari total asset yang dimiliki oleh perusahaan. Ukuran perusahaan adalah skala besar kecilnya perusahaan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai cara antara lain dengan ukuran pendapatan, total aset dan total ekuitas. Menurut pandangan dari teori Agensi (*Agent*), perusahaan besar memiliki aktivitas operasional yang lebih kompleks dan tingkat risiko yang lebih tinggi. Kondisi ini yang membuat pemilik perusahaan (*Principal*) menuntut untuk memiliki kualitas audit yang baik untuk meminimalkan perbedaan informasi antara manajemen dan pemegang saham. Perusahaan besar juga cenderung diawasi oleh investor, regulator, dan masyarakat, sehingga mereka juga memiliki dorongan besar untuk memastikan bahwa auditor yang digunakan memiliki reputasi tinggi dan memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan terpercaya dan transparan. Oleh karena itu, ukuran perusahaan menjadi salah satu

pendorong terjadinya *auditor switching* apabila auditor sebelumnya belum sesuai ekspektasi kualitas yang baik.

Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin kecil peluang untuk melakukan *auditor switching* (Aricksa, 2021). Hal ini didukung dengan penelitian Aricksa (2021), hasil penelitiannya yaitu ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *auditor switching*. Menurut Aricksa (2021), perusahaan yang memiliki skala besar umumnya sudah memilih auditor yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan dianggap memiliki kompetensi dalam melakukan audit terhadap laporan keuangannya, sehingga kemungkinan pergantian auditor dalam perusahaan tersebut menjadi lebih kecil. Menurut (Pratama & Ariantoro, 2019), semakin besar perusahaan, maka semakin kecil perusahaan melakukan *auditor switching* karena perusahaan sudah memilih auditor berkualitas yang memiliki kemampuan untuk menyelidiki dan memperbaiki laporan keuangan dengan baik. Hal tersebut terjadi karena perusahaan yang besar memiliki hubungan yang lebih luas dengan pihak eksternal, dan mereka ingin memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan yang disampaikan kepada investor telah diperiksa secara menyeluruh. Oleh karena itu, perusahaan besar akan memilih auditor yang dianggap mampu memahami kondisi keseluruhan perusahaan, sehingga tidak perlu melakukan pergantian auditor. Kemudian, penelitian Widnyani dan RM (2018), ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *auditor switching*. Menurut Widnyani dan RM (2018), pengukuran ukuran perusahaan klien dengan menggunakan logaritma natural dari total aset menunjukkan hasil negatif, yang menunjukkan bahwa peningkatan total aset mengakibatkan kecenderungan perusahaan untuk tidak melakukan pergantian auditor. Berdasarkan pernyataan itu, maka H_1 dapat dinyatakan sebagai berikut.

H_1 : Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *auditor switching*.

2.9.2 Pengaruh *Financial Distress* terhadap *Auditor Switching* (H_2)

Financial distress menggambarkan kondisi kesulitan keuangan yang dialami perusahaan yang dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha. Dalam kerangka teori agensi, kondisi *distress* meningkatkan potensi konflik antara manajemen dan pemegang saham. Pada situasi ini, manajemen sering berusaha mengurangi tekanan

dari pemilik, kreditur, dan regulator dengan cara mengendalikan persepsi publik terhadap perusahaan. Salah satu strategi yang mungkin dilakukan adalah mengganti auditor untuk mendapatkan auditor yang dianggap lebih toleran terhadap risiko atau memberikan opini yang lebih mendukung. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang mengalami *distress* memiliki potensi lebih besar untuk melakukan *auditor switching* sebagai mekanisme pemulihan citra maupun efisiensi biaya.

Dalam perspektif dari Teori *Signaling*, *financial distress* memberikan sinyal yang negatif kepada pasar tentang kondisi perusahaan. Pergantian auditor dapat dipandang sebagai upaya perusahaan memberikan sinyal perbaikan, seperti mencari auditor yang lebih berkualitas atau lebih kompeten dalam menangani kondisi keuangan yang kompleks. Namun, pergantian auditor juga dapat memberikan sinyal negatif jika dianggap sebagai upaya manajemen menghindari auditor yang ketat atau untuk mendapatkan opini audit yang lebih ringan. Oleh karena itu, hubungan antara *financial distress* dan *auditor switching* sangat menarik untuk diuji karena dapat mengarah pada interpretasi sinyal yang berbeda.

Berdasarkan penelitian dari Wijaya (2026) mengatakan bahwa *financial distress* berdampak positif yang mengindikasikan bahwa kondisi keuangan perusahaan yang mengalami tekanan serta adanya pergantian auditor cenderung memperpanjang waktu penyelesaian audit.

Ha2: *Financial distress* berpengaruh positif terhadap *auditor switching*.

2.9.3 Pengaruh *Audit Report Lag* terhadap *Auditor Switching* (H3)

Auditor report lag merupakan waktu yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan proses audit sejak akhir periode laporan keuangan. Dalam sudut pandang teori *signaling*, auditor berperan memberikan sinyal kualitas kepada pihak luar, terutama investor, mengenai transparansi dan kredibilitas perusahaan. *Audit report lag* yang panjang dapat memberikan sinyal negatif kepada pasar, misalnya bahwa perusahaan memiliki masalah internal, sistem pelaporan yang tidak efisien, atau auditor kurang kompeten dalam menyelesaikan tugasnya. Sinyal negatif ini dapat mempengaruhi persepsi investor dan memunculkan ketidakpastian terhadap laporan keuangan. Sebaliknya, audit yang diterbitkan tepat waktu memberikan

sinyal positif bahwa perusahaan memiliki tata kelola yang baik dan auditor bekerja secara efektif. Terlambatnya publikasi laporan keuangan auditan yang disebabkan oleh *audit report lag* akan mempengaruhi reaksi investor dan pengguna laporan keuangan lainnya. Saat terjadi *audit report lag*, perusahaan bisa saja kehilangan calon investor potensial mereka karena keterlambatan pelaporan keuangan yang diaudit (Rohmah dkk, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Rimadani (2018) membuktikan bahwa *audit report lag* berpengaruh positif terhadap *auditor switching*. Perusahaan akan mengganti auditornya agar tidak terjadi lagi *audit report lag* oleh KAP yang sama. Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

Ha3: *Audit report lag* berpengaruh positif terhadap *auditor switching*.

2.9.4 Pengaruh *Audit Fee* terhadap *Auditor Switching* (H4)

Audit fee merupakan biaya yang harus dibayarkan kepada auditor atau jasa audit yang diberikan. Berdasarkan teori agensi perusahaan berupaya memaksimalkan efisiensi biaya, termasuk dalam beban audit. Jika *audit fee* meningkat atau dianggap tidak sebanding dengan nilai jasa yang diberikan auditor, perusahaan dapat mempertimbangkan untuk mengganti auditor dengan auditor lain yang menawarkan biaya lebih rendah. Dalam konteks ini, *audit fee* menjadi faktor penting yang dapat mempengaruhi keputusan *auditor switching*, terutama bagi perusahaan yang sedang melakukan efisiensi biaya.

Selain itu juga, teori sinyal menjelaskan bahwa *audit fee* yang tinggi dapat menjadi sinyal bahwa perusahaan menginginkan audit berkualitas tinggi dari auditor bereputasi baik. Namun, dalam beberapa situasi, *audit fee* yang terlalu tinggi dapat dianggap sebagai beban, terutama bagi perusahaan dengan kinerja keuangan yang menurun. Kondisi ini dapat membuat perusahaan lebih memilih auditor yang menawarkan biaya jasa lebih rendah, sehingga mendorong terjadinya *auditor switching*.

Penelitian yang dilakukan oleh Widnyani & Muliarta (2018), mengatakan jika *audit fee* ditetapkan terlalu tinggi dari batas yang ditetapkan oleh perusahaan

maka perusahaan cenderung untuk melakukan *auditor switching* akan lebih besar, sehingga *fee* yang melampaui batas kemampuan perusahaan akan menyebabkan perusahaan mencari KAP lain menggunakan penetapan *fee* yang lebih rendah walaupun perusahaan wajib berhenti bekerjasama dengan KAP yang biasa memberikan jasa audit terhadap laporan keuangannya. Berdasarkan dari teori serta hasil penelitian terdahulu maka hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini.

Ha4: *Audit fee* berpengaruh positif terhadap *auditor switching*.

